

## TAJUK RENCANA

### Pemanfaatan Tanah Desa

**KEBERADAAN** dan pemanfaatan tanah desa (kalurahan) selama ini belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Bahkan dimungkinkan masih banyak perangkat desa yang sampai saat ini belum paham aturan mengenai pemanfaatan tanah desa. Masih banyak juga pemanfaatan tanah desa di DIY yang masih bermasalah.

Tanah desa dimaksud meliputi tanah kas desa, tanah *pelungguh* dan sejenisnya, yang pemanfaatannya telah diatur melalui Peraturan Gubernur DIY (Pergub) Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Terkait Pergub tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY sejak tahun 2019 lalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev), khususnya yang berkaitan dengan aturan bahwa pemanfaatan tanah desa harus mendapat izin dari Gubernur DIY.

Menurut Kepala DPTR DIY, Krido Suprayitno, setelah dilakukan monev, ditemukan banyak tanah desa yang pemanfaatannya tidak sesuai lagi dengan izin dari Gubernur. Kebanyakan sudah berubah fungsi, dari pertanian menjadi nonpertanian. Juga banyak tanah desa yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu namun belum ada izin dari Gubernur, termasuk pemanfaatan Sultan Ground.

Berdasarkan temuan-temuan dalam monev yang dilakukan DPTR DIY, mestinya ada tindakan tegas terhadap pelanggaran-pe-

langgaran tersebut. Aturan mengenai pemanfaatan tanah desa mestinya juga disosialisasikan ke masyarakat. Apalagi sudah ada standard operating prosedur (SOP) pengawasan pemanfaatan tanah desa/kalurahan. Dengan demikian masyarakat bisa ikut mengawasi pemanfaatan tanah desa yang tersebar sampai pelosok pedesaan di DIY.

Terungkap dalam workshop yang diselenggarakan DPTR DIY, Selasa (7/12) lalu, masalah izin dan ketidaksesuaian pemanfaatan tanah desa ditemukan di semua kabupaten yang ada di DIY. Sangat mungkin, pelanggaran aturan pemanfaatan tanah desa tidak hanya ada di sejumlah desa yang menjadi sasaran onev DPTR DIY. Yakni Gunungkidul (4 desa/kalurahan, Kulonprogo (6), Bantul (7), dan Sleman (5).

Menurut Kepala DPTR DIY, juga ada beberapa ketentuan mengenai pemanfaatan tanah desa. Di antaranya tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh menambah luas tanah, dan tidak boleh menambah kegiatan usaha tanpa izin.

Kapan dan di manapun, keberadaan tanah selalu menimbulkan masalah yang rumit, bila masalah-masalah berkait pemanfaatan tanah tidak selalu diantisipasi dan segera diselesaikan. Sebab, nilai kemanfaatan tanah selalu berkembang seiring kemajuan zaman. Perlu dicatat, masalah-masalah pemanfaatan tanah desa jangan pernah dianggap enteng. □

## Bagi NU Biasa, 'Gegeran' Jadi 'Ger-geran'

**BANYAK** orang menebak-nebak mengapa PPKM level 3 batal diberlakukan secara nasional sekitar Natal dan Tahun Baru (nataru) oleh pemerintah. Ada yang menebak karena alasan ekonomi. Banyak yang menduga karena trend pandemi Covid-19 yang semakin membaik. Semuanya sah-sah saja dan masuk diakal.

Tebakan orang NU (*nahdliyyin*) lain lagi. Bukan karena alasan ekonomi atau tren pandemi yang membaik. Tapi karena konon pemerintah menghindari perpecahan di pucuk pimpinan NU. Kalau NU pecah pemerintah juga ikut repot. Awalnya kubu Tanfidziah (KH Said Aqil Siradj-Helmy Faisal Zaini) menghendaki Mukatamar NU di Lampung diadakan pasca-nataru untuk menghindari barengan dengan penerapan Level 3 PPKM. Sementara Syuriah (KH Miftahul Ahyar-Yahya Cholil Staquf) ingin mukatamar digelar sebelumnya. Alasannya sama-sama, agar tidak bertabrakan dengan nataru.

### Panutan

Jadi gegeran soal beda waktu itulah yang membuat warga NU se Indonesia bingung. Semuanya panutan, semua level kiai, kok nggak mampu menyepakati waktu. Bukankah NU sangat dekat dengan perintah *wasyawwir hum* : (bermusyawarahlah kalian). Orang tak peduli alasan sebenarnya dari kedua pihak. Mereka sama-sama bersikukuh dengan pilihan penentuan waktu. Diadakanlah pertemuan di Kantor PBNU oleh Syuriah, tapi kedua petinggi Tanfidziah nggak mau hadir. Lalu kedua pihak dipertemukan oleh kiai-kiai sepuh dalam pertemuan di sebuah pesantren di Semarang. Kedua kubu ketemu dan berembuk, tapi *deadlock*, tanpa hasil.

Syuriah pokoknya menghendaki mukatamar digelar sebelum nataru dengan alasannya. Sementara di sisi lain,

### Imam Anshori Saleh

Tanfidziah kukuh sesudah nataru. Syuriah mengagendakan Konferensi Besar, Tanfidziah pun mengajak rapat gabungan. Tetap saja *gegeran*. Nahdliyyin tambah bingung. Kok aneh? Katanya jika ulama bermusyawarah itu mudah menghasilkan kesepakatan. Kok sampai ada *gegeran* hanya soal sepele. Media massa senang, ada isu seksi. Pemerintah

*Orang tak peduli alasan sebenarnya dari kedua pihak. Mereka sama-sama bersikukuh dengan pilihan penentuan waktu. Diadakanlah pertemuan di Kantor PBNU oleh Syuriah, tapi kedua petinggi Tanfidziah nggak mau hadir. Lalu kedua pihak dipertemukan oleh kiai-kiai sepuh dalam pertemuan di sebuah pesantren di Semarang. Kedua kubu ketemu dan berembuk, tapi deadlock, tanpa hasil.*

rikum nggak mau campur tangan. Nanti dituding intervensi, disangka ada kepentingan.

Walhasil, di hari Selasa 7 Desember yang keramat. Tidak di markas PBNU yang di Kramat Raya, tapi di Hotel Bidakara dekat Patung Pancoran — entah siapa yang menginisiasi — terjadilah Syuriah dan Tanfidziah bersua. Dipepakati Mukatamar NU dilangsungkan 23-25 Desember di Bandarlampung. Itulah jalan tengah sesuai prinsip *tawassuth* yang diagungkan NU. Tak ada yang menang tak ada yang kalah. Di NU biasa, *gegeran* jadi *ger-geran*. Tangan Kiai

Said, Yahya Staquf dan Helmy Faisal bergandengan dengan senyum mengembara bang tampak di hampir semua media massa. Nahdliyyin, kita semua lega.

### Bersaing Ketat

Ya *gegeran* menjadi *ger-geran* merupakan hal yang sangat sudah biasa di NU. Dulu ketika KH Idham Chalid edigulingkan Gus Dur dari kursi Ketua Umum PBNU di Mukatamar NU Situbondo (1984) seolah terjadi perpecahan. Tapi setelah Gus Dur menjabat Ketua Umum PBNU, beliau tetap *tawadlu'*, dan selalu *sowan* ke kediaman Pak Idham Chalid di Cipete. Saat Gus Dur berseteru dengan Abu Hasan sesudah bersaing ketat dalam Mukatamar NU di Cipasung, Tasikmalaya (1994), Gus Dur pun menyambangi Abu Hasan yang tergoles sakit. Juga takziah saat Abu Hasan meninggal.

Meski berakhir *ger-geran*, tetap ada poin yang bertambah dan berkurang dari *gegeran* di PBNU menjelang Mukatamar NU di Lampung ini. Poin untuk siapa yang bertambah dan poin siapa yang berkurang, silakan simak sendiri. NU itu organisasi sosial keagamaan yang sangat terbuka, transparan untuk dilihat dan dinilai. Ampun kiai. Wasalaam. □

*\*) Dr Imam Anshori Saleh, pengamat masalah sosial, mengikuti Mukatamar NU dari 1984 hingga 2014*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : [opinikr@gmail.com](mailto:opinikr@gmail.com) dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-1100  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak beres ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Pembelajaran Sejarah

**NASIONALISME** merupakan sikap cinta dan bangga pada tanah air dengan kecintaan yang terimplimentasikan pada akal budi, karya cipta, dan ragam prestasi yang dipersembahkan untuk negara Indonesia. Cinta tanah air merupakan landasan filosofis dan idealis dalam membangun peradaban bangsa melalui kecintaan budaya, masyarakat, lingkungan alam, dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdikari.

Konsep nasionalisme diperkenalkan pertama kali oleh Kertanegara dari Kerajaan Singasari melalui gagasannya tentang Cakra Mandala (Wawasan Nusantara) dengan melakukan ekspansi sampai keluar Jawa dan meliputi seluruh Dwipantara. Pada tahun 1275 Kertanegara mengirimkan ekspedisi untuk menaklukkan tanah Melayu yang kemudian dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Nasionalisme yang dilakukan Kertanegara untuk menyatukan di bawah Panji Singasari menjadi ilham terbentuknya awal Nusantara.

Konsep nasionalisme yang kedua diperkenalkan oleh Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit dengan Sumpah Palapa pada tahun 1336 yang berisi 'Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa'. Secara umum menegaskan bahwa apabila daerah yang disebutkan di atas belum bersatu di bawah Panji Majapahit, maka Gajah Mada tidak akan hidup

bersenang-senang dan merasakan kenikmatan duniawi.

Konsep nasionalisme yang ketiga diperkenalkan oleh Sukarno yang merupakan tokoh Proklamasi dan pendiri bangsa Indonesia. Kepiawaiannya beliau dalam menyatukan beragam suku bangsa, agama, dan ras menjadi prestasi yang membanggakan hingga berdirinya Republik Indonesia. Keberadaan Pancasila dan UUD 1945 telah terbukti mampu menyatukan seluruh wilayah Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Semangat untuk tetap bersatu, saling menghargai dengan sikap asah, asih, dan asuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembelajaran sejarah telah mampu mengenalkan kearifan lokal, ragam perjuangan, dan kejayaan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dengan pembelajaran sejarah diharapkan siswa mampu belajar dari masa lalu untuk lebih arif bijaksana di masa kini, dan mempersiapkan hari esok dengan lebih baik. Historia Magistra Vitae yang berarti Sejarah adalah Guru yang terbaik, dengan sejarah akan mengajarkan manusia untuk berhati-hati dan waspada dalam menentukan sikap terhadap suatu permasalahan bangsa. Pemahaman sejarah yang benar terhadap suatu bangsa akan meningkatkan sikap nasionalisme dan semangat untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi yang gemilang. □

*\*) Eko Prasetyo SPd Esp MPd, Guru Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.*

## Dana Desa Mendukung Kemandirian Pangan

**BEBERAPA** tahun terakhir dana desa yang dialokasikan meningkat signifikan. Tahun 2021 total alokasi mencapai Rp 72 triliun terdistribusi pada 74.961 desa. Rerata alokasi mendekati Rp 1 miliar setiap desa, yang merupakan sumberdaya keuangan sangat potensial untuk pembangunan desa.

Prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 yang berorientasi pada program percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara umum, program prioritas mencakup tiga hal yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan adaptasi kebiasaan baru desa.

### Kemandirian Pangan

Secara global dan nasional, pandemi covid-19 yang masih berlangsung telah berdampak luas terhadap pertanian dan ketahanan pangan. Laporan *Global Food Security Index* 2021 menunjukkan ranking ketahanan pangan Indonesia turun dibandingkan kondisi sebelum pandemi. Pada 2019, Indonesia ranking 65, namun tahun 2021 turun pada posisi 69.

Meskipun secara global status ketahanan pangan menurun, dalam dua tahun masa pandemi, sektor pertanian merupakan salah satu di antara beberapa sektor ekonomi yang mampu tumbuh positif ketika sektor ekonomi yang lain limbung. Sektor pertanian harus mendapat intervensi program yang lebih kuat. Dengan mempertimbangkan pertanian memiliki multifungsi yaitu menyediakan pangan bagi 272 juta penduduk, menyediakan pekerjaan untuk 30% angkatan kerja, bahan baku industri, sumber devisa serta menjaga stabilitas lingkungan dan memperkuat relasi sosial-budaya masyarakat.

Salah satu implementasi program prioritas penggunaan dana desa sangat ter-

### Subejo

kait dengan pembangunan sektor pertanian yaitu penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa. Hal ini juga sangat relevan dengan implementasi program prioritas lainnya yaitu mendukung usaha ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih merata. Dana Desa sangat strategis dimanfaatkan untuk mendukung berbagai aspek pembangunan pertanian menuju kemandirian pangan desa.

### Inovasi Tepat Guna

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo Jawa Tengah, awal Desember 2021 mengadakan FGD peningkatan akselerasi pembangunan pertanian. Disitu muncul berbagai gagasan untuk memadukan berbagai potensi sumberdaya pembangunan pertanian termasuk skim pendanaan program yang dapat dikombinasikan antara APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan Dana Desa. Ketika alokasi dana APBN, APBD Provinsi/Kabupaten tidak mampu menyentuh setiap desa, dana desa sangat strategis untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan pertanian. Dengan dukungan penyuluhan dan pembinaan teknis dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

### Nilai Tambah

Pemanfaatan dana desa untuk mendukung ketahanan pangan dan penumbuhan ekonomi desa dapat dilakukan melalui introduksi dan pemantapan berbagai inovasi, secara komprehensif mulai dari aspek hulu hingga hilir. Sehingga tidak hanya meningkatkan produksi namun juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Dalam penguatan kapasitas aparatatur OPD dan introduksi inovasi tepat guna pertanian, pemerintah daerah dapat membangun kola-

borasi sinergis dengan perguruan tinggi. Melalui program kajian, pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen maupun kegiatan KKN tematik juga dapat dengan program pembangunan desa melalui pendampingan oleh mahasiswa selama satu semester sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Salah satu inovasi produksi pertanian tepat guna yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal seperti introduksi pupuk hayati bakteri bacillus plus yang dikembangkan Tim Fakultas Pertanian UGM sangat prospektif disebarkan pada desa-desa pertanian. Introduksi inovasi tata kelola kelembagaan pertanian di desa serta inovasi pengolahan dan pemasaran berbagai produk pertanian dapat diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Ini sangat prospektif meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pertanian di desa. □

*\*) Subejo PhD, Wakil Dekan Bidang Penelitian, PKM dan Kerjasama Fakultas Pertanian UGM*

## Pojok KR

Menurut Presiden Jokowi, pemberantasan korupsi perlu metode yang luar biasa.

### -- Bukan biasa luar.

\*\*\*

Hindari klaster baru, Gubernur DIY minta PHRI dan Asita mengontrol anggota.

### -- Cukup dikontrol?

\*\*\*

Pembatalan PPKM Level 3 tidak menghalangi pembatasan di Kota Yogyakarta.

### -- Jangan diportal.

*Berabs*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenahda. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandi, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk@yahoo.com](mailto:iklankrkyk@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'.. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) 563125, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) 496549 dan (0274) 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

**Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti.

**Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.